

Sinyal Perubahan Kurikulum 2013

Oleh
Ikhfan Haris

JANJI Menteri Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan penerapan Kurikulum 2013 (K13) akhirnya terbukti. Melalui surat edaran yang dikirimkan ke seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Indonesia mengukuhkan alias memperkuat sinyal penghentian penggunaan Kurikulum 2013 tersebut, terkecuali pada 6.326 sekolah uji coba K13. Back to old curriculum, kebijakan kembali ke kurikulum lama - Kurikulum 2006, sontak memunculkan komentar pro-kontra di berbagai kalangan, baik guru, praktisi, pemerhati maupun pakar pendidikan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, menilai penghentian Kurikulum 2013 merupakan langkah mundur dari kebijakan pendidikan nasional (Kompas, 7 Desember 2014). Pernyataan tersebutpun langsung dibalas oleh Anies dengan mengemukakan keputusannya menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah tepat. Anies menilai keputusan pemerintah tersebut juga bukan sebuah kemunduran (Republika, 8 Desember 2014).

Ada angin apakah gerangan yang menyebabkan pemerintah ingin kembali ke Kurikulum 2006? Mengapa menghentikan penerapan kurikulum 2013 yang masih seumur jagung ini? Padahal kenyataan menunjukkan dan sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu kenapa duet-pemerintahan Jokowi-Kalla tetap berkeinginan kembali memberlakukan Kurikulum 2006?

Sesungguhnya jika kita mau jujur, dapat dikatakan bahwa guru kita ini sudah sangat resisten (over resistency) dan terbiasa (business as usual) terhadap kebijakan pergantian kurikulum. Sebagai contoh, sekitar sembilan tahun yang lalu (tahun 2005) saat itu, belum lepas guru kita dicekam kecemasan akan keberhasilan dalam menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tiba-tiba pemerintah melalui Depdiknas mengintrodukir kurikulum baru, Kurikulum 2006 - yang dilabeli dengan "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)". Artinya, belum tuntas dan sempurna penerapan suatu kurikulum lalu muncul lagi kurikulum baru atau penggantian kurikulum. Dipenghujung tahun 2014 ini muncul kebijakan baru pemerintah untuk kembali menerapkan "kurikulum baru yang notabene lama". Tentulah kebijakan ini membuat para guru harus siap dan menerima konsekuensi kebijakan tersebut, karena pergantian kurikulum bagi guru sudah menjadi "warna" yang senantiasa harus "digunakan" dalam menjalankan tugas mereka pada kegiatan pembelajaran.

Hematnya, daripada berkuat pada pusingan/kisaran perbincangan pro-kontra tentang kembali ke kurikulum KTSP atau Kurikulum 2006 sebagai pengganti Kurikulum 2013, ada baiknya kita melihat persoalan kurikulum dengan broad matter-perspective dalam artian cakupan yang luas dari kurikulum itu sendiri. Sejatinya, aspek pertama yang terkait dengan kebijakan bongkar-pasang kurikulum adalah merupakan pencerminan bahwasanya betapa sistem pendidikan di negara kita ini tidak baku. Dapat dikatakan bahwa sejak 2013, bahkan

bahkan pihak penentu kebijakan pendidikan sedang asyik seolah melakukan "laboratorium" uji-coba sistem pendidikan yang hasilnya harus dinanti dengan perasaan was-was dan harap-harap cemas. Secara teoritis, upaya semacam itu juga secara tidak langsung mengindikasikan bahwa "kekuasaan" masih mendominasi gerak dan dinamika sistem pendidikan kita.

Dari sisi filosofi pendidikan, nampaknya geliat gonta-ganti kurikulum yang dilakukan oleh rejim pemerintah yang berkuasa (baca Menteri Pendidikan) cenderung terpeleset pada nalar sempit. Nalar sempit yang dimaksud adalah perancang kurikulum - (apapun jenis dan "merek" kurikulumnya) - pada tingkat pusat lebih banyak berpijak pada tataran idealis dan amat sedikit mempertimbangkan tataran praktis di lapangan. Bahwasanya setiap ada kebijakan pergantian kurikulum, berarti ada "proyek" dan pastinya dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah. Namun, hasilnya kegiatan itu jauh api dari panggangnya - tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaliknya justru membawa frustrasi karena membingungkan.

Betapa tidak, coba kita perhatikan, begitu ada suatu kebijakan baru dalam konteks ini kurikulum maka akan muncullah beberapa pendapat dan informasi pakar kurikulum di beberapa media yang menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pendidikan. Dan pada akhirnya membuat guru dan mereka yang bertugas langsung di kelas/lapangan menjadi bingung dengan luberan saling-silang pendapat terhadap kurikulum tersebut. Di samping membingungkan, model ataupun metode berbagai kegiatan ilmiah terkait sosialisasi kurikulum baru selama ini hanya mendengarkan orang berceramah, tanpa action plan yang serius sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah. Bahkan, mungkin saja si penceramah itu hanya mampu secara teoretik-konseptual saja tapi miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Sesungguhnya inti permasalahan nalar sempit pemerintah terletak pada cara pandang terhadap kurikulum itu sendiri (perspective on curriculum). Berapa kalipun suatu kurikulum dirubah namun jika cara pandang terhadap kurikulum tersebut tidak berubah maka hasilnya tentu peningkatan mutu yang diharapkan tetap tidak akan tercapai. Tengok saja pengalaman pemerintah selama ini yang gonta-ganti dan bongkar pasang kurikulum tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Lebih parah dan celaknya lagi tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan terhadap pergantian atau perubahan suatu kurikulum.

Cara pandang yang sempit itu dapat kita lihat pada kebijakan pergantian suatu kurikulum yang tidak memperhatikan aspek kesinambungan kurikulum itu sendiri. Misalnya dari beberapa kali perubahan kurikulum yang dilakukan hanya berbasis dan berfokus pada jenjang pendidikan yang ada, kurikulum SD, SLTP dan SLTA. Nampaknya belum ada usaha untuk membangun kesinambungan

terpakat, bukan secara terpisah-pisah. Untuk hal kesinambungan kurikulum ini terdapat dua pertanyaan essential yang seringkali luput dari sentuhan birokrat pendidikan dalam penggantian suatu kurikulum. Pertanyaan itu adalah (1) Desain kurikulum pendidikan dasar yang bagaimana yang dapat dipergunakan agar tujuan pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud? dan (2) Isi (content) dan bahan pelajaran yang bagaimana yang sesuai untuk dipergunakan dalam mewujudkan pendidikan dasar bagi anak didik sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama? Itulah sebabnya, sangat diharapkan sinyal perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ini nantinya jika kembali akan dilaksanakan maka seyogyanya haruslah merupakan paket utuh (integrated package) atau satu kesatuan (unity) antara tingkat pendidikan SD dan SLTP. Sebab jika kita mengacu pada kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang mengisyaratkan bahwa program ini terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar atau pendidikan lain yang setara sekolah dasar serta program tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau pendidikan lain yang setara SLTP. Dengan dimasukkannya SLTP ke dalam jenjang pendidikan dasar dan perlunya wajib belajar sekolah dasar dilanjutkan sampai SLTP, maka pendidikan dasar sembilan tahun ini merupakan kesatuan paket dan satu kesatuan program.

Lalu, bagaimana manajemen kurikulum yang berkesinambungan itu harus dilaksanakan (how to manage a continuous curriculum?). Kontekstual, paling tidak acuan perencanaan kurikulum yang akan dijabarkan dalam disain kurikulum fokusnya adalah pengembangan disiplin ilmu yang sesuai dengan karakter dan tujuan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya disiplin inilah yang akan dijabarkan dan menjadi inti (core curriculum) dari perencanaan kurikulum yang akan dilakukan oleh guru. Hal ini sangat sejalan jika dikaitkan dengan kurikulum 2006 yang merupakan produk Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) ini, dimana dalam penerapannya sangat menekankan dan mendorong (encouraging) sekolah mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan lingkungannya (needs-driven based curriculum). Oleh sebab itu nantinya disiplin ilmu dalam kurikulum yang dikembangkan di sekolah akan sangat kaya, sebab sekolah akan menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masing-masing.

Kefleksibilitas (flexibility) dan kesederhanaan (simple) dari Kurikulum 2006 ini adalah bersifat sangat nyata, hal ini ditunjukkan bahwa rumusan standar kompetensi yang diperlukan hanya dua, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar (dua kolom), selebihnya akan dijabarkan sepenuhnya oleh sekolah. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang diterapkan sebelumnya atau sesudahnya, misalnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum 2013. Khusus untuk kurikulum KBK, Depdiknas merumuskan 4 kompetensi yaitu: kompetensi dasar, hasil belajar, indikator dan materi pokok (empat kolom) untuk para guru dan sekolah.

Namun demikian perlu dicatat kekeluasaan guru dalam merumuskan dua kompetensi

dasar itu sangatlah tergantung pada kemampuan guru (teacher competence in managing curriculum). Hal inilah yang nantinya bisa saja menjadi bumerang terhadap Kurikulum 2006. Betapa tidak, harus kita jujur mengakui bahwa guru kita ini bukanlah tipe guru "pengembang kurikulum" (curriculum developer), selain itu kebiasaan dan penyakit lama yang cenderung bersifat selalu mengikuti petunjuk dari atas alias sentralistik tetap masih menjadi kebiasaan yang masih melingkupi pada guru kita. Karena itu, sejatinya langkah konkrit untuk mengantisipasi kembalinya kita ke "pangkuan" kurikulum 2006 ini adalah mempersiapkan guru untuk menjadi "pengelola" kurikulum (manager of curriculum) di lapangan dan tentunya didukung dengan ketersediaan dana operasional sekolah yang cukup memadai, dalam hal ini prosi khusus yang dananya dapat dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sumber lainnya.

Akhirnya menangkap momentum sinyal kembalinya kita ke Kurikulum 2006, dimana itikad dan niat baik pemerintah sesuai dengan filosofi dasar yang terkandung dalam Kurikulum 2006 yaitu memberikan kelonggaran kepada lembaga pendidikan, sampai kepada tingkat sekolah untuk mendesain sendiri kurikulumnya dengan menggunakan acuan-acuan pokok yang telah ditetapkan patut direspon secara positif, terlebih di jaman otonomi dan reformasi seperti sekarang ini, tentunya kita semua harus menyambutnya dengan menyiapkan diri. Tugas berat sekarang paling tidak adalah bagaimana kelak guru akan menjalankan kurikulum tersebut di lapangan (sekolah).

Intinya adalah sekolah diharapkan mampu berafiliasi dengan kurikulum 2006 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing (needs-driven). Dan pada akhirnya dengan pemberian "kebebasan" kepada sekolah untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya maka diharapkan hasil atau apa yang akan diterapkan di lapangan nantinya merupakan hasil pengembangan kurikulum yang berpedoman pada prinsip relevansi, fleksibilitas, keterpaduan/sinergitas, kontinuitas, praktis dan efektivitas. Sebab keberhasilan pengembangan kurikulum yang akan dilakukan oleh para guru akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan, terlebih lagi bilamana hasil evaluasi membuktikan tercapainya tujuan-tujuan dalam kurikulum yang telah mereka desain dan kembangkan tersebut. Kurikulum hasil pengembangan ini juga sekaligus merupakan sebagai suatu "proses" pencapaian keberhasilan guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pendek kata, bagaimanapun dan sesering apapun kebijakan penggantian kurikulum dilakukan, yang pasti hanya satu yang tidak berganti atau berubah yaitu guru. Sebab sesungguhnya guru itu sendiri adalah "kurikulum-hidup". Dialah sebagai "pemeran-utama" dalam "melakoni" kurikulum di pentas pendidikan. Jadi, sejatinya "guru - sang kurikulum hidup - yang tak lekang oleh panas dan luntur oleh hujan, menjadi ujung tombak pelaksanaan setiap kurikulum, kurikulum apapun jenis dan namanya, termasuk kurikulum lama yang diberlakukan kembali - Kurikulum 2006. Semoga.....!!!!

*Pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo
Surel: ifanharis@ung.ac.id*